



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaannya maka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Lamandau ini dapat terselesaikan.

Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya yang diharapkan berdampak positif pada kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Lamandau secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Lamandau. Disadari bahwa Penyusunan Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan, Untuk itu saran - saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Nanga Bulik, Juli 2024

Pengguna Anggaran,

LUHUT TAMPUBOLON, SE. M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640827 199003 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	(i)
DAFTAR ISI.....	(ii)
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	(iv)
BAGIAN KE I LRA	
BAGIAN KE II NERACA	
BAGIAN KE III LAPORAN OPERASIONAL	
BAGIAN KE IV LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
BAGIAN KE V CALK	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	5
2.1 Ekonomi Makro.....	5
2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.2 Kebijakan Keuangan	7
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.....	7
2.4 Penjelasan Perubahan Anggaran.....	7
2.4.1 Dasar Perubahan Anggaran.....	7
2.4.2 Tujuan Perubahan Anggaran.....	8
2.4.3 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Anggaran.....	8
2.4.4 Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.....	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	11
3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	11
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	11
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah.....	11
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	12
3.2.1 Permasalahan yang dihadapi.....	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	13
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	13
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	14



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	25
5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	25
5.1.1 Pendapatan.....	25
5.1.2 Belanja.....	26
5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	33
5.2 Penejelasan Pos-Pos Neraca.....	33
5.2.1 Aset.....	33
5.2.2 Aset Lainnya.....	40
5.2.3 Kewajiban.....	41
5.3 Kegiatan Operasional.....	43
5.3.1 Pendapatan-LO.....	43
5.3.2 Beban-LO.....	44
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	54
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	51
BAB VII PENUTUP.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Hutang 2023	
2. Daftar Beban Dibayar Di Muka	
3. Jurnal Umum Penyesuaian	
4. Aset (Rekapitulasi Aset)	
5. Persediaan Dan Stock Opname Barang Persediaan	
6. Daftar Pemberian Hibah	



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nanga Bulik, Juli 2024

Pengguna Anggaran,

LUHUT TAMPUBOLON, SE. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023 DAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	27.800.000,00	39.240.000,00	141,15	27.800.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.800.000,00	39.240.000,00	141,15	27.800.000,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	27.800.000,00	39.240.000,00	141,15	27.800.000,00
5	BELANJA DAERAH	10.805.898.205,00	10.763.954.167,00	99,61	7.677.694.430,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	10.747.524.205,00	10.706.134.167,00	99,61	7.371.423.220,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.878.352.054,00	2.852.385.247,00	99,10	2.765.951.672,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.244.637.151,00	3.229.664.920,00	99,54	3.466.729.548,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	4.624.535.000,00	4.624.084.000,00	99,99	1.138.742.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	58.374.000,00	57.820.000,00	99,05	306.271.210,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.200.000,00	51.650.000,00	98,95	26.430.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	274.191.210,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.174.000,00	6.170.000,00	99,94	5.650.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.778.098.205,00)	(10.724.714.167,00)	99,50	(7.649.894.430,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.778.098.205,00)	(10.724.714.167,00)	99,50	(7.649.894.430,00)

Nanga Bulik, 1 Januari 2023

KEPALA DINAS

LUHUT TAMPUBOLON, SE., M.Si

NIP. 196408271990031001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 December 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga				
Unit Organisasi : 2.13 . 2.13.01		Dinas Pemuda dan Olahraga				
Sub Unit Organisasi : 2.13 . 2.13.01 . 01		Dinas Pemuda dan Olahraga				

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	27.800.000,00	0,00	39.240.000,00	39.240.000,00	11.440.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.800.000,00	0,00	39.240.000,00	39.240.000,00	11.440.000,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	27.800.000,00	0,00	39.240.000,00	39.240.000,00	11.440.000,00
4 . 1 . 2 . 22	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	27.800.000,00	0,00	39.240.000,00	39.240.000,00	11.440.000,00
5	BELANJA DAERAH	10.805.898.205,00	0,00	10.763.954.167,00	10.763.954.167,00	(41.944.038,00)
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.502.887.054,00	0,00	7.476.469.247,00	7.476.469.247,00	(26.417.807,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.878.352.054,00	0,00	2.852.385.247,00	2.852.385.247,00	(25.966.807,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.331.969.842,00	0,00	1.324.518.928,00	1.324.518.928,00	(7.450.914,00)
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.820.756,00	0,00	146.904.950,00	146.904.950,00	(1.915.806,00)
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.766.002,00	0,00	28.670.000,00	28.670.000,00	(1.096.002,00)
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.063.932,00	0,00	80.313.780,00	80.313.780,00	(2.750.152,00)
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	73.278.592,00	0,00	71.773.550,00	71.773.550,00	(1.505.042,00)
5 . 1 . 1 . 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.065,00	0,00	16.303,00	16.303,00	(4.762,00)
5 . 1 . 1 . 13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.200.332.865,00	0,00	1.189.105.736,00	1.189.105.736,00	(11.227.129,00)
5 . 1 . 1 . 19	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.979.000,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	(17.000,00)
5 . 1 . 1 . 24	Belanja Honorarium	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	4.624.535.000,00	0,00	4.624.084.000,00	4.624.084.000,00	(451.000,00)
5 . 1 . 4 . 13	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.225.000.000,00	0,00	4.225.000.000,00	4.225.000.000,00	0,00
5 . 1 . 4 . 14	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	59.535.000,00	0,00	59.527.000,00	59.527.000,00	(8.000,00)
5 . 1 . 4 . 15	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	340.000.000,00	0,00	339.557.000,00	339.557.000,00	(443.000,00)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.303.011.151,00	0,00	3.287.484.920,00	3.287.484.920,00	(15.526.231,00)
5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.244.637.151,00	0,00	3.229.664.920,00	3.229.664.920,00	(14.972.231,00)
5 . 2 . 1 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	843.197.199,00	0,00	841.345.326,00	841.345.326,00	(1.851.873,00)
5 . 2 . 1 . 04	Belanja Jasa Kantor	1.123.746.346,00	0,00	1.112.269.237,00	1.112.269.237,00	(11.477.109,00)
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.820.356,00	0,00	48.490.447,00	48.490.447,00	(329.909,00)
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.195.000,00	0,00	24.195.000,00	24.195.000,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 10	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	297.120.000,00	0,00	296.930.000,00	296.930.000,00	(190.000,00)
5 . 2 . 1 . 19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.170.000,00	0,00	53.170.000,00	53.170.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.071.500,00	0,00	55.067.650,00	55.067.650,00	(3.850,00)
5 . 2 . 1 . 23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	739.840.000,00	0,00	738.720.510,00	738.720.510,00	(1.119.490,00)
5 . 2 . 1 . 25	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.076.750,00	0,00	48.076.750,00	48.076.750,00	0,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.200.000,00	0,00	51.650.000,00	51.650.000,00	(550.000,00)
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Alat Bantu	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.200.000,00	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	(350.000,00)
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.174.000,00	0,00	6.170.000,00	6.170.000,00	(4.000,00)
5 . 2 . 6 . 08	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	6.174.000,00	0,00	6.170.000,00	6.170.000,00	(4.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(10.778.098.205,00)	0,00	(10.724.714.167,00)	(10.724.714.167,00)	53.384.038,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.778.098.205,00)	0,00	(10.724.714.167,00)	(10.724.714.167,00)	53.384.038,00



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Per 31 December 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga		
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga		
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga		
URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	3.005.000,00	2.369.575,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	3.005.000,00	2.369.575,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	6.714.820.210,00	6.712.239.730,00
Peralatan dan Mesin	2.370.840.081,00	2.319.190.081,00
Gedung dan Bangunan	6.923.253.769,97	6.923.253.769,97
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.611.560,00	150.611.560,00
Aset Tetap Lainnya	6.170.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.419.710.014,00)	(4.951.812.025,00)
JUMLAH ASET TETAP	10.745.985.606,97	11.153.483.115,97
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	8.250.000,00	8.250.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00

<div>Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga</div> <div>Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga</div> <div>Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga</div>		
URAIAN	2023	2022
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	10.748.990.606,97	11.155.852.690,97
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	92.223.171,00	100.940.921,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	92.223.171,00	100.940.921,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	92.223.171,00	100.940.921,00
EKUITAS		
EKUITAS	10.656.767.435,97	11.054.911.769,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10.748.990.606,97	11.155.852.690,97



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga		
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga		
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga		
URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	11.054.911.769,97	11.379.213.002,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.125.438.981,00)	(7.818.195.663,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Tanah	2.580.480,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Barang Ekstrakompatabel	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Kas BLUD	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Penyertaan Modal	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peratalatan dan mesin	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Penyusuan Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.724.714.167,00	7.493.894.430,00
EKUITAS AKHIR	10.656.767.435,97	11.054.911.769,97

Nanga Bulik, 17 Januari 2024
KEPALA DINAS

LUHUT TAMPUBOLON, SE., M.Si
NIP. 196408271990031001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023 DAN 2022

<div>Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</div> <div>Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga</div> <div>Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga</div> <div>Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga</div>					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN - LO	39.240.000,00	27.800.000,00	11.440.000,00	41,15
7 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	39.240.000,00	27.800.000,00	11.440.000,00	41,15
7 . 1 . 1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 2	Retribusi Daerah-LO	39.240.000,00	27.800.000,00	11.440.000,00	41,15
7 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	11.164.678.981,00	7.845.995.663,00	3.318.683.318,00	42,30
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	2.843.768.139,00	2.774.430.205,00	69.337.934,00	2,50
8 . 1 . 2	Beban Persediaan	889.422.076,00	1.122.112.890,00	(232.690.814,00)	(20,74)
8 . 1 . 3	Beban Jasa	1.492.548.617,00	1.643.324.234,00	(150.775.617,00)	(9,18)
8 . 1 . 4	Beban Pemeliharaan	108.237.650,00	139.839.200,00	(31.601.550,00)	(22,60)
8 . 1 . 5	Beban Perjalanan Dinas	738.720.510,00	566.240.200,00	172.480.310,00	30,46
8 . 1 . 6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 8	Beban Hibah	4.624.084.000,00	1.138.742.000,00	3.485.342.000,00	306,07
8 . 1 . 9	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 10	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 11	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	111.435.603,00	113.366.972,00	(1.931.369,00)	(1,70)
8 . 2 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	344.451.990,00	336.101.441,00	8.350.549,00	2,48
8 . 2 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.596.438,00	11.838.521,00	(1.242.083,00)	(10,49)
8 . 2 . 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.413.958,00	0,00	1.413.958,00	0,00
<div>LAPORAN OPERASIONAL</div> <div>Halaman 1 dari 2</div>					

<div><div>Urusan Pemerintahan : 2</div><div>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</div></div> <div><div>Bidang Pemerintahan : 2 . 13</div><div>Kepemudaan dan Olah Raga</div></div> <div><div>Unit Organisasi : 2 . 13 . 01</div><div>Dinas Pemuda dan Olahraga</div></div> <div><div>Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01</div><div>Dinas Pemuda dan Olahraga</div></div>					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(11.125.438.981,00)	(7.818.195.663,00)	(3.307.243.318,00)	42,30
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 5	Defisit Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 7	Defisit Penghapusan Tagihan TP/TG	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 8	Defisit Penghapusan Aset Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 9	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11.125.438.981,00)	(7.818.195.663,00)	(3.307.243.318,00)	42,30
		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.125.438.981,00)	(7.818.195.663,00)	(3.307.243.318,00)	42,30
<div>Nanga Bulik, 17 Januari 2024</div> <div>KEPALA DINAS</div> <div>LUHUT TAMPUBOLON, SE., M.Si</div> <div>NIP. 196408271990031001</div>					
<div>LAPORAN OPERASIONAL</div> <div>Halaman 2 dari 2</div>					



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengembangkan potensi sektor Kepemudaan dan Keolahragaan agar lebih berkualitas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Selalu diawali dengan perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Kerja Tahun Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 sebagaimana telah di ubah dengan Peruran Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dengan maksud menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga selama Tahun Anggaran 2023



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Laporan Keuangan OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk menyampaikan informasi keuangan OPD secara transparan, jujur dan akuntabel mengenai kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau pada Per 31 Desember Tahun 2023 untuk diketahui dan disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
-



7. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 04 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 262);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 861);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum. (Berita Daerah Kabuapten Lamandau Tahun 2023 Nomor 907);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kabuapten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023. (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 914).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk mempermudah proses memahami dan menilai serta mengevaluasi Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. BAB I Berupa pendahuluan menjelaskan tentang :
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
-



2. BAB II Berisi tentang pencapaian target kinerja APBD.
 - 2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.4 Penjelasan Perubahan Anggaran
3. BAB III Berisi tentang Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan terdiri dari :
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
4. BAB IV Berisi tentang kebijakan akuntansi mengenai basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
 - 4.2 Basis Akutansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; SKPD;
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.
5. BAB V Berisi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan SOPD tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.
6. BAB VI Berisi tentang informasi-informasi nonkeuangan SOPD
7. BAB VII Merupakan penutup Catatan Atas Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Permasalahan yang muncul seperti pengangguran, kemiskinan, tingkat harga mempunyai, Implansi akibat yang buruk terhadap jalannya perekonomian dan mengganggu kestabilan ekonomi suatu Daerah. Atas dasar itu, bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh suatu Daerah tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu tujuan dari kegiatan perekonomian suatu Daerah secara makro.

Ada pun tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu Daerah. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul.

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Dengan adanya pandemi covid 19 dan kenaikan harga BBM yang terjadi di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Lamandau yang berimbas pada semua sektor terutama ekonomi dan ini menjadi tantangan dalam pemulihan perekonomian tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan. Memperhatikan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, pendidikan, penanggulangan pengangguran dan mendorong pemulihan dunia usaha. Sedangkan arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah adalah ekselerasi ekonomi lokal melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau mengambil arah kebijakan ekonomi yaitu pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan Lamandau JUARA.

Dengan memperhatikan prioritas nasional dan prioritas daerah dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut :



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

- a. Memberi perlindungan terhadap masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan melalui peningkatan efektifitas program perlindungan sosial untuk ekselaborasi pemulihan ekonomi sosial, antara lain:
 - Mengawal pelaksanaan program pusat berupa Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Akurasi data perbaikan mekanisme, integrasi/sinergi antar Menjamin keberlangsungan dunia usaha/dorongan kepada dunia
- b. Menjamin keberlangsungan dunia usaha/dorongan kepada dunia usaha untuk pulih pasca pandemi terutama UMKM lokal antara lain:
 - Memprioritaskan UMKM lokal untuk mengembangkan produk lokal;
 - Program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM.
 - Memberikan pelatihan-pelatihan pada sektor usaha masyarakat
- c. Penguatan quality control Tim Koordinasi Penanggulangan Penguatan quality control Tim Koordinasi Penanggulangan

Sumber : Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan PDRB. Indikator ini menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Sumber : Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023



2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Kebijakan keuangan daerah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kebijakan umum pendapatan daerah, kebijakan umum belanja daerah, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sumber : Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2023 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Mengelola Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp 27.800.000,00 realisasinya sebesar Rp 39.240.000,00 atau 141,15 persen

b. Realisasi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Anggaran Belanja dianggarkan Rp10.805.898.205,00 realisasinya sebesar Rp 10.763.954.167,00 atau 99,61% , dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 10.747.524.205,00 realisasinya sebesar Rp 10.706.134.167,00 atau 99,61 persen
2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 58.374.000,00 realisasinya sebesar Rp 57.820.000,00 atau 99,05 persen.

2.4 Penjelasan Perubahan Anggaran

2.4.1 Dasar Perubahan Anggaran

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD kedalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBD.



yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya perubahan APBD antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Upaya dalam pencapaian target RPJMD 2018-2023;
5. Penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, Proyeksi Belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada perubahan APBD tahun 2023.

2.4.2 Tujuan Perubahan Anggaran

1. Menetapkan skala prioritas untuk urusan wajib dan pilihan;
2. Menetapkan kegiatan dan anggaran yang ditambah/baru maupun dikurangi ataupun dihilangkan untuk dapat diakomodir dalam RAPBD Perubahan 2023;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023;
4. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan daerah walaupun adanya perubahan anggaran;
5. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
6. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
7. Pencapaian target kinerja tujuan dan kinerja sasaran daerah

2.4.3 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Anggaran

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang semula oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan



masyarakat. Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Kegiatan fisik dan non fisik yang dapat diselesaikan pada sisa tahun anggaran guna percepatan pembangun.

2.4.4 Perubahan Anggaran Perangkat Daerah

Untuk Perubahan Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran tahun 2023,

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Targetkan Sebesar Rp 27.800.000,00 Mengalami Perubahan Sebesar Rp 4.400.000,00 atau Naik 18,80% dari target APBD Murni Sebesar Rp.23.400.000,00 yang berasal dari Retribusi Daerah (Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga) yang di Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga.
- b. Belanja Mengalami Perubahan dari Rp10.322.288.671,00 menjadi Rp10.805.898.205,00 Meningkatkan Sebesar Rp 483.609.534,00 atau naik 4,69% dari belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Mengalami Perubahan sebesar Rp 477.909.534,00 atau naik 4,65% yang Semula Rp 10.269.614.671,00 menjadi Rp 10.747.524.205,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai Mengalami Perubahan (Penurunan) sebesar (Rp 55.699.064,00,-) atau Turun (1,90 %) yang semula Rp 2.934.051.118,00 menjadi Rp 2.878.352.054,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Mengalami Perubahan sebesar Rp 283.298.598,00 atau naik 9,57% yang semula Rp 2.961.338.553,00 menjadi Rp 3.244.637.151,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

- c. Belanja Hibah Mengalami Perubahan sebesar Rp 250.310.000,00 atau naik 5,72% yang semula Rp 4.374.225.000,00 menjadi Rp 4.624.535.000,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal Mengalami Perubahan sebesar Rp 5.700.000,00 atau Naik 10,82% yang semula Rp 52.674.000,00 Menjadi Rp 58.374.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Mengalami Perubahan sebesar Rp 5.700.000,00 atau naik 12,26% yang semula Rp 46.500.000,00 menjadi Rp 52.200.000,00
- b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tidak Mengalami Perubahan dengan anggaran sebesar Rp 6.174.000,00



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah TA 2023 diarahkan untuk meningkatkan derajat kemandirian fiskal Kabupaten Lamandau, dalam rangka pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat baik untuk membiayai Belanja Operasional dan Belanja Modal.

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Target : Rp 27.800.000,00

Realisasi : Rp 39.240.000,00

Prosentase : 141,15 persen

Target dan realisasi pendapatan Daerah TA2023 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Target : Rp 27.800.000,00

Realisasi : Rp 39.240.000,00

Presentase : 141,15 persen

Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari satu komponen yaitu:

1) Retribusi Daerah

Target : Rp 27.800.000,00

Realisasi : Rp 39.240.000,00

Presentase : 141,15 persen

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah TA 2023 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Lamandau, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal.

1. Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

Target : Rp 10.805.898.205,00

Realisasi : Rp 10.763.954.167,00

Presentase : 99,61 persen

Belanja terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal:

a. Belanja Operasi

Target : Rp 10.747.524.205,00

Realisasi : Rp 10.706.134.167,00

Presentase : 99,61 persen

Terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Target : Rp 2.878.352.054,00

Realisasi : Rp 2.852.385.247,00

Presentase : 99,10 persen

2) Belanja Barang dan Jasa

Target : Rp 3.244.637.151,00

Realisasi : Rp 3.229.664.920,00

Presentase : 99,54 persen



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

3) Belanja Hibah

Target	: Rp 4.624.535.000,00
Realisasi	: Rp 4.624.084.000,00
Presentase	: 99,99 persen

b. Belanja Modal

Target	: Rp 58.374.000,00
Realisasi	: Rp 57.820.000,00
Presentase	: 99,05 persen

Terdiri dari:

1) Belanja Modal Tanah

Target	: Rp 0
Realisasi	: Rp 0
Presentase	: 0 persen

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Target	: Rp 52.200.000,00
Realisasi	: Rp 51.650.000,00
Presentase	: 98,95 persen

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Target	: Rp 0
Realisasi	: Rp 0
Presentase	: 0 persen

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Target	: Rp 6.174.000,00
Realisasi	: Rp 6.170.000,00
Presentase	: 99,94 persen

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

3.2.1 Permasalahan yang dihadapi

- Ada 2 aplikasi yang di gunakan dari proses perencanaan dan pelaporan keuangan yaitu aplikasi SIPD untuk Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dan Aplikasi Simda Untuk Pelaporan Keuangan;
- Ada perbedaan antara kode akun BMD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dengan kode Bagan Akun Standar (BAS).



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD. Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Lamandau yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lamandau.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun berdasarkan basis akrual (accrual). Penerapan basis akrual dimaksud adalah:



- a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
- b. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca dimana aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkansetiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibanyang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas meliputi kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikeloladan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawabBendahara Umum Daerah terdiri dari :



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

1. Kas di Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening kas umum daerah;
2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan;
3. Kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
 - 1) Kas di Bendahara Pengeluaran, meliputi:
 - (a) Sisa Uang Persediaan (UP) yang berasal dari BUD yang belum/tidak dibelanjakan dan belum disetor kembali ke kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi; dan
 - (b) Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir periode akuntansi.
 - 2) Kas dicatat sebagai berikut.
 - (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya;
 - (b) Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca; dan
 - (c) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b. Persediaan

Persediaan meliputi:

- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang cetakan, alat-alat listrik dan elektronik habis pakai, materai, perangko dan benda pos, peralatan kebersihan habis pakai dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
-



- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 5) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Beban persediaan diakui pada saat perolehan persediaan (pendekatan beban) dan pada akhir periode akuntansi diakui sebesar jumlah persediaan yang telah terpakai atau dikonsumsi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Selisih antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik yang disebabkan karena persediaan usang, rusak atau kadaluarsa, diakui sebagai beban persediaan. Selisih persediaan diakui sebagai kerugian daerah, jika selisih persediaan tersebut merupakan suatu jumlah yang abnormal, tidak wajar dan jumlahnya material.

c. Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1) Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan



sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke akun yang sesuai dalam akun aset tetap.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus sesuai dengan kebijakan mengenai batasan minimum kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan dalam laporan



operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.

Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan
- c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2023 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2023. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2023, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.

Dalam menghitung penyusutan aset tetap, nilai sisa/nilai residu diabaikan dengan pertimbangan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan daerah



dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir manfaatnya. Selain itu penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk menandingkan antara biaya dengan pendapatan sebagaimana lazimnya.

Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan satu tahun penuh (pendekatan tahunan) pada akhir periode tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap.

3) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB), adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, meliputi Software komputer, Lisensi dan Frenchise, Hak Paten dan Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah dan budaya, ATB dalam pengerjaan.

Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

4) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-lain, dicatat menurut nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain.



d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, keterikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Ada 2 (dua) Jenis Kewajiban :

- 1) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya seperti Jasa air, Listrik, internet dan Telp.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat, utang dalam negeri – Pemerintah Daerah lainnya, Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank, Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Dalam Negeri – Obligasi, Utang jangka panjang lainnya.

kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa dengan perjanjian di bayar , misal utang atas belanja ATK. Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban Membayar kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government related events), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government acknowledge events), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. Adapun Pengukuran Kewajiban adalah :

- 1) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

- 2) Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 4) Pendapatan diterima di muka, dicatat sebesar jumlah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah.
 - 5) Utang belanja/Utang kepada pihak ke tiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
 - 6) Pengukuran Utang Transfer, adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 7) Utang Jangka Pendek Lainnya, pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
 - 8) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut.
 - (a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga perbankan, lembaga bukan bank.
 - (b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
-



e. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

a. Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksudkan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan atau pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah, atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD, atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima



dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, dimana Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan LO sebesar pendapat yang menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan yang dipungut berdasarkan klaim, seperti klaim kepada BPJS atau klaim kepada pihak-pihak lainnya, diakui pada saat klaim telah mendapatkan persetujuan BPJS/pihak lainnya.

b. Belanja dan Beban

1) Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau GU Nihil. Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagan Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran. Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara Serah Terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi. Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban. Beban bunga diakui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga diakui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang diakui pada akhir periode akuntansi. Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud diakui pada akhir periode akuntansi.

Beban Lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item)



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Rp 27.800.000,00	Rp 39.240.000,00	Rp 27.800.000,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 39.240.000,00 dan Rp 27.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 27.800.000,00	Rp 39.240.000,00	70,85	Rp 27.800.000,00
Jumlah	Rp 27.800.000,00	Rp 39.240.000,00	70,85	Rp 27.800.000,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Asli Daerah	Rp 27.800.000,00	Rp 39.240.000,00	Rp 27.800.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 39.240.000,00 dan Rp 27.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	Rp 27.800.000,00	Rp 39.240.000,00	141,15	Rp 27.800.000,00
Jumlah	Rp 27.800.000,00	Rp 39.240.000,00	141,15	Rp 27.800.000,00

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Retribusi Daerah	Rp 27.800.000,00	Rp 39.240.000,00	Rp 27.800.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 39.240.000,00 dan Rp 27.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp 27.800.000,00	Rp 39.240.000,00	141,15	Rp 27.800.000,00
Jumlah	Rp 27.800.000,00	Rp 39.240.000,00	141,15	Rp 27.800.000,00



Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Daerah di TA 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah karena pada tahun 2023 peminat pemain badminton meningkat sehingga pendapatan retribusi mengalami kenaikan.

5.1.2 Belanja

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja	Rp 10.805.898.205,00	Rp10.763.954.167,00	Rp 7.677.694.430,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 10.763.954.167,00 dan Rp 7.677.694.430,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	10.747.524.205,00	10.706.134.167,00	99,61	7.371.423.220,00
Belanja Modal	58.374.000,00	57.820.000,00	99,05	306.271.210,00
Jumlah	10.805.898.205,00	10.763.954.167,00	99,61	7.677.694.430,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Operasi	Rp 10.747.524.205,00	Rp 10.706.134.167,00	Rp 7.371.423.220,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 10.706.134.167,00 dan Rp 7.371.423.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	2.878.352.054,00	2.852.385.247,00	99,10	2.765.951.672,00
Belanja Barang dan Jasa	3.244.637.151,00	3.229.664.920,00	99,54	3.466.729.548,00
Belanja Hibah	4.624.535.000,00	4.624.084.000,00	99,99	1.138.742.000,00
Jumlah	10.747.524.205,00	10.706.134.167,00	99,61	7.371.423.220,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	2.878.352.054,00	2.852.385.247,00	2.765.951.672,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.852.385.247,00 dan Rp 2.765.951.672,00 dengan rincian sebagai berikut:



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	1.331.969.842,00	1.324.518.928,00	99,44	1.117.139.320,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0,00	0,00	0,00	117.333.135,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.820.756,00	146.904.950,00	98,71	142.585.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.766.002,00	28.670.000,00	96,32	25.975.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	83.063.932,00	80.313.780,00	96,69	74.013.240,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	73.278.592,00	71.773.550,00	97,95	75.396.417,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.065,00	16.303,00	77,39	13.010,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.200.332.865,00	1.189.105.736,00	99,06	1.206.926.550,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.979.000,00	1.962.000,00	99,14	1.170.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.120.000,00	9.120.000,00	100,00	5.400.000,00
Jumlah	2.878.352.054,00	2.852.385.247,00	99,10	2.765.951.672,00

Penjelasan :

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA. 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2023 terdapat 2 (Dua) orang pegawai pengapusan dari CPNS diangkat menjadi PNS
- b. Terdapat 6 (Enam) Orang Pegawai yang naik pangkat
- c. Terdapat 6 (Enam) Orang Pegawai naik gaji berkala, sehingga belanja gaji pegawai mengalami kenaikan dan berpengaruh terhadap realisasi.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.244.637.151,00	Rp 3.229.664.920,00	Rp 3.466.729.548,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.229.664.920,00 dan Rp Rp 3.466.729.548,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Per Akun :

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.898.584,00	4.889.000,00	99,80	3.065.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.905.250,00	8.892.000,00	99,85	10.025.684,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.753.000,00	34.749.200,00	99,99	33.894.750,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	565.704,00	560.000,00	98,99	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit	2.325.044,00	2.320.000,00	99,78	0,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Ternak/Bibit Ikan				
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.711.483,00	9.701.950,00	99,90	12.033.125,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.130.106,00	1.100.000,00	97,34	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	41.112.814,00	41.062.400,00	99,88	46.200.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.517.041,00	65.412.876,00	99,84	46.347.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	18.289.766,00	18.270.500,00	99,89	26.364.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	62.485.575,00	62.051.700,00	99,31	45.417.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.412.270,00	2.318.500,00	96,11	7.350.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	12.030.804,00	12.015.000,00	99,87	4.988.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	203.941.558,00	203.413.000,00	99,74	202.720.080,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.281.000,00	18.185.000,00	99,47	18.613.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.195.000,00	50.100.000,00	99,81	38.217.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.719.000,00	4.471.000,00	94,74	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	124.959.200,00	124.869.200,00	99,93	168.364.869,00
Belanja Pakaian Paskibraka	170.964.000,00	170.964.000,00	100,00	168.282.882,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	369.310.000,00	368.510.000,00	99,78	397.160.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00	24.990.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	302.222.000,00	296.690.421,00	98,17	324.029.390,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	162.056.000,00	159.814.298,00	98,62	222.255.437,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	91.680.000,00	90.379.181,00	98,58	66.202.228,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	20.724.204,00	20.645.422,00	99,62	20.609.558,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tata Rias	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	20.250.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	14.200.000,00	13.900.000,00	97,89	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00	5.650.000,00
Belanja Tagihan Air	1.316.000,00	1.031.700,00	78,40	460.600,00
Belanja Tagihan Listrik	73.681.542,00	73.192.135,00	99,34	81.367.786,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.080.000,00	16.040.000,00	99,75	22.170.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.000.000,00	8.794.480,00	97,72	8.774.740,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.226.600,00	5.021.600,00	96,08	7.296.600,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	45.519.480,00	45.311.196,00	99,54	47.669.011,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.300.876,00	3.179.251,00	96,32	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	3.571.908,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	4.500.000,00
Belanja Sewa Mebel	445.000,00	445.000,00	100,00	3.300.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	5.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	7.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	3.500.000,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	800.000,00
Belanja Sosialisasi	297.120.000,00	296.930.000,00	99,94	319.780.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	38.990.000,00	38.990.000,00	100,00	61.963.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	7.180.000,00	7.180.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00	4.130.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.865.000,00	12.865.000,00	100,00	63.486.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	42.206.500,00	42.202.650,00	99,99	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	654.248.000,00	653.263.210,00	99,85	501.446.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.792.000,00	74.657.300,00	99,82	64.794.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.476.750,00	10.476.750,00	100,00	1.980.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	37.600.000,00	37.600.000,00	100,00	277.250.000,00
Jumlah	3.244.637.151,00	3.229.664.920,00	99,54	3.466.729.548,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan perubahan penganggaran pada tahun 2022 masuk pada belanja barang dan jasa sedangkan di tahun 2023 penganggaran masuk di belanja hibah
- b. Adanya penurunan anggaran pada belanja barang dan jasa.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Hibah	Rp 4.624.535.000,00	Rp 4.624.084.000,00	Rp 1.138.742.000,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 4.624.084.000,00 dan Rp 1.138.742.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Per Akun

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.225.000.000,00	4.225.000.000,00	100,00	1.093.742.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	59.535.000,00	59.527.000,00	99,99	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	340.000.000,00	339.557.000,00	99,87	45.000.000,00
Jumlah	4.624.535.000,00	4.624.084.000,00	99,99	1.138.742.000,00

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA. 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemberian hibah oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau kepada KONI Nomor : 426/05/Dispورا/I/2023 Tanggal 31 Januari 2023 untuk mengikuti kegiatan PORPROV Tahun 2023
- b. Adanya pemberian hibah oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau kepada KNPI Nomor : 427/10/Dispورا/III/2023 Tanggal 03 Maret 2023
- c. Adanya pemberian hibah oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau kepada Kwartir Pramuka Nomor : 427/09/Dispورا/II/2023 Tanggal 14 Februari 2023 untuk mengikuti JAMBORE Tingkat Nasional di Jawa Barat
- d. Adanya pemberian hibah barang dan alat olahraga kepada pemuda Karang Taruna

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemuda dan olahraga tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial Selain Belanja Hibah

5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal	Rp 58.374.000,00	Rp 57.820.000,00	Rp 306.271.210,00

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.200.000,00	51.650.000,00	98,95	26.430.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	274.191.210,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.174.000,00	6.170.000,00	99,94	5.650.000,00
Jumlah	58.374.000,00	57.820.000,00	99,05	306.271.210,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Rincian Belanja Modal Tanah TA. 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Peralatan dan Mesin	52.200.000,00	51.650.000,00	26.430.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 51.650.000,00 dan Rp 26.430.000,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Pompa	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00		18.900.000,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00		3.500.000,00
Belanja Modal Personal Computer	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	4.030.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.200.000,00	23.850.000,00	98,55	0,00
Jumlah	52.200.000,00	51.650.000,00	98,95	26.430.000,00



Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya penambahan peralatan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas pegawai.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Gedung dan	0,00	0,00	274.191.210,00
Bangunan			

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 274.191.210,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	249.691.210,00
Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	274.191.210,00

Penjelasan :

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung Bangunan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena pada tahun 2023 tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Jalan, Irigasi	0,00	0,00	0,00
dan Jaringan			

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Perlengkapan Pasang Rawa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



Penjelasan :
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena pada tahun 2023 dan 2022 tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal			
Aset Tetap	6.174.000,00	6.170.000,00	5.650.000,00
Lainnya			

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 6.170.000,00 dan Rp 5.650.000,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	6.174.000,00	6.170.000,00	99,94	5.650.000,00
Jumlah	6.174.000,00	6.170.000,00	99,94	5.650.000,00

Penjelasan :
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di Tahun 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya kebutuhan peralatan untuk menunjang kegiatan olahraga tradisional di tahun 2023.

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(10.778.098.205,00)	(10.724.714.167,00)	(7.649.894.430,00)

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp 10.748.990.606,97 Kewajiban sebesar Rp 92.223.171,00 dan Ekuitas sebesar Rp 10.656.767.435,97

5.2.1 Aset

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset	Rp 10.748.990.606,97	Rp 11.155.852.690,97



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Total saldo Aset Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 10.748.990.606,97 Mengalami Penurunan sebesar (Rp406.862.084,00) dari tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	3.005.000,00	2.369.575,00	26,82	635.425,00
Aset Tetap	10.745.985.606,97	11.153.483.115,97	3,65	(407.497.509,00)
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.748.990.606,97	11.155.852.690,97	3,65	(406.862.084,00)

5.2.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lancar	Rp. 3.005.000,00	Rp. 2.369.575,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Dinas Pemuda dan Olahragaper tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.005.000,00 atau naik sebesar Rp 635.425,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 2.369.575,00 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban dibayar dimuka	3.005.000,00	2.369.575,00	26,82	635.425,00
Jumlah	3.005.000,00	2.369.575,00	26,82	635.425,00

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Dibayar Dimuka	3.005.000,00	2.369.575,00

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.005.000,00 dan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.369.575,00

Adapun Rincian Beban Dibayar Dimuka, sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2023	Saldo 31 Des 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Pajak Dibayar Di Muka	3.005.000,00	2.369.575,00	26,82	635.425,00
Jumlah	3.005.000,00	2.369.575,00	26,82	635.425,00

Adapun rincian sebagai berikut :

Beban Pajak Dibayar Di Muka				
Uraian	Saldo 31 Des 2023	Saldo 31 Des 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Pajak KendaraanBormotorBeroda Dua	3.005.000,00	2.369.575,00	26,82	635.425,00
Jumlah	3.005.000,00	2.369.575,00	26,82	635.425,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

5.2.1.1.2 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	0,00	0,00

Saldo persediaan sebesar Rp 0,00 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2023 dan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00

Dinas Pemuda dan Olahraga
Tabel, Laporan Persediaan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2022		0,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		0,00
4	Ditambah:		
5	Belanja persediaan LRA 2023	889.422.076,00	
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Penerimaan hibah persediaan	0,00	
8	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	889.422.076,00	
9	Dikurangi:		
10	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2022	0,00	
11	Pengeluaran hibah persediaan	0,00	
12	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	0,00	
13	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+8+13)		889.422.076,00
14	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)		(889.422.076,00)
15	Persediaan tahun 2022 (14+15)		0,00

5.2.1.2 Aset Tetap

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap	10.745.985.606,97	11.153.483.115,97

Saldo Aset Tetap Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 10.745.985.606,97 mengalami penurunan sebesar Rp 407.497.509,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tanah	6.714.820.210,00	6.712.239.730,00	0,04	2.580.480,00
Peralatan dan Mesin	2.370.840.081,00	2.319.190.081,00	2,23	51.650.000,00
Gedung dan Bangunan	6.923.253.769,97	6.923.253.769,97	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.611.560,00	150.611.560,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	6.170.000,00	0,00		6.170.000,00
Akumulasi Penyusutan	(5.419.710.014,00)	(4.951.812.025,00)	9,45	(467.897.989,00)
Jumlah	10.745.985.606,97	11.153.483.115,97	(3,65)	(407.497.509,00)



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Penambahan :		
Belanja Modal 2023	57.820.000,00	
Koreksi Pencatatan aset tetap	2.580.480,00	
Mutasi masuk dari SOPD	0,00	
Reklas dari belanja barang dan jasa	0,00	
Pembelian dari Dana BOS/BLUD	0,00	
Penambahan bukan pengadaan (Hibah)	0,00	
Reklas aset tetap di skpd	0,00	
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	
Jumlah Penambahan		60.400.480,00
Pengurangan :		
• Reklas keluar ke beban Barang dan jasa	0,00	
• Reklas keluar ke ekstrakom	0,00	
• Beban penyusutan	(467.897.989,00)	
• Mutasi keluar ke SOPD lain	0,00	
• Reklas aset tetap dan aset lainnya	0,00	
• Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	
• Reklas keluar ke persediaan	0,00	
Jumlah Pengurangan		(467.897.989,00)
Jumlah (1+2-3)		10.745.985.606,97

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset tetap adalah sebagai berikut:

5.2.1.2.1 Tanah

Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	6.714.820.210,00	6.712.239.730,00

Saldo Aset Tanah Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.714.820.210,00 mengalami kenaikan dibandingkan saldo tahun sebelumnya yang di sebabkan adanya kenaikan NJOP Lapangan sebagaimana rincian dibawah ini:

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Tanah	6.712.239.730,00	0,00	2.580.480,00	6.714.820.210,00	2.580.480,00
Jumlah	6.712.239.730,00	0,00	2.580.480,00	6.714.820.210,00	2.580.480,00

Tanah 6.712.239.730,00

Penambahan :		
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Tanah)	0,00	
• Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	
• Koreksi atas Penambahan NJOP Tanah Lapangan	2.580.480,00	
Jumlah Penambahan		2.580.480,00
Pengurangan :		
• Mutasi Keluar antar OPD	(0,00)	
• Penghapusan	(0,00)	
Jumlah Pengurangan		(0,00)
Jumlah (1+2-3)		6.714.820.210,00



5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Peralatan dan Mesin 2.370.840.081,00 2.319.190.081,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.370.840.081,00 mengalami Penambahan sebesar Rp51.650.000,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	2.319.190.081,00	0,00	51.650.000,00	2.370.840.081,00	32.080.000,00
Jumlah	2.319.190.081,00	0,00	51.650.000,00	2.370.840.081,00	32.080.000,00

Penambahan sebesar Rp 51.650.000,00 pengurangan sebesar (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	2.319.190.081,00
Penambahan :	
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	51.650.000,00
• Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
• Reklas masuk dari Belanja Barang & Jasa	0,00
• Reklas masuk dari Aset Tetap lainnya	0,00
• Hibah dari Kementrian	0,00
• Mutasi Masuk OPD	0,00
Koreksi pencatatan	
Jumlah Penambahan	51.650.000,00
Pengurangan :	
• Mutasi keluar dari SOPD	(0,00)
• Reklas ke Barang Jasa	(0,00)
• Reklas ke Gedung dan Bangunan	(0,00)
• Reklas ke Aset lainnya (rusak berat)	
• Reklas keluar ke ekstrakompentable	(0,00)
• Reklas keluar ke persediaan (barang yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu mobil)	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	2.370.840.081,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Gedung dan Bangunan 6.923.253.769,97 6.923.253.769,97

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.923.253.769,97 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan saldo tahun sebelumnya.



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	6.923.253.769,97	0,00	0,00	6.923.253.769,97	0,00
Jumlah	6.923.253.769,97	0,00	0,00	6.923.253.769,97	0,00

Penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	6.923.253.769,97
Penambahan :	
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Gedung dan Bangunan)	0,00
• Reklas dari Belanja Barang Jasa	0,00
• Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
• Reklas masuk dari Peralatan dan Mesin	0,00
• Reklas masuk dari KDP	0,00
• Hibah dari kementrian	0,00
• Mutasi masuk antar SOPD	0,00
Koreksi Saldo Awal (atas temuan BPK)	
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan :	
• Reklasifikasi keluar ke Barang Jasa	(0,00)
• Reklas keluar ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	(0,00)
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(0,00)
• Reklas keluar ke KDP	(0,00)
• Reklas keluar ke Aset Tidak Berwujud	(0,00)
• Mutasi keluar antar SOPD	(0,00)
• Penghapusan	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	6.923.253.769,97

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.611.560,00	150.611.560,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 150.611.560,00 tidak mengalami Penambahan dan penurunan dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.611.560,00	0,00	0,00	150.611.560,00	0,00
Jumlah	150.611.560,00	0,00	0,00	150.611.560,00	0,00

Penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.611.560,00
Penambahan :	
• Koreksi pencatatan saldo awal	
• Belanja Modal Tahun 2021 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan)	0,00 0,00
• Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00 0,00
• Reklasifikasi Masuk dari KDP	
• Hibah jaringan listrik dari desa sukamaju dan desa sumber cahaya	0,00 0,00
• Mutasi Masuk dari OPD	
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan :	
• Reklas keluar ke Tanah	(0,00)
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(0,00)
• Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	(0,00)
• Reklas keluar ke KDP	(0,00)
• Reklas keluar ke barang jasa	(0,00)
• Reklas keluar ke Investasi Permanen	(0,00)
• Mutasi Keluar dari OPD	(0,00)
• Penghapusan	
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	150.611.560,00

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap Lainnya	6.170.000,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.170.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.170.000,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	6.170.000,00	6.170.000,00	6.170.000,00
Jumlah	0,00	0,00	6.170.000,00	6.170.000,00	6.170.000,00

Kenaikan sebesar Rp 6.170.000,00 dan penurunan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	0,00
Penambahan :	
• Koreksi pencatatan saldo awal	0,00
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan) pengadaan sumpit	6.170.000,00
• Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00
• Reklasifikasi Masuk dari KDP	0,00
• Mutasi Masuk dari OPD	0,00 0,00
Jumlah Penambahan	6.170.000,00
Pengurangan :	
• Reklas keluar ke Tanah	(0,00)
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(0,00)
• Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	(0,00)



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

• Reklas keluar ke KDP	(0,00)	
• Reklas keluar ke barang jasa	(0,00)	
• Reklas keluar ke Investasi Permanen	(0,00)	
• Mutasi Keluar dari OPD	(0,00)	
• Penghapusan	(0,00)	
Jumlah Pengurangan		(0,00)
Jumlah (1+2-3)		6.170.000,00

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan	(5.419.710.014,00)	(4.951,812,025,00)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp5.419.710.014,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp 467.897.989,00) dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Penyusutan	(4.951,812,025,00)	(0)	(467.897.989,00)	(5.419.710.014)	(467.897.989,00)
Jumlah	(4.951,812,025,00)	(0)	(467.897.989,00)	(5.419.710.014)	(467.897.989,00)

Kenaikan sebesar (Rp467.897.989,00) sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan 2022	(4.951,812,025,00)
Penambahan :	
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(111.435.603,00)
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(344.451.990,00)
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(10.596.438,00)
• Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(10.596.438,00)
Jumlah Penambahan	(467.897.989,00)
Pengurangan :	
• Penghapusan	
• Mutasi	
• Koreksi Salah Saji	
Jumlah Pengurangan	
Jumlah (1+2-3)	(5.419.710.014,00)

5.2.2 Aset Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lainnya	0,00	0,00

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp 0,00 terdiri atas akumulasi Aset yang dibatasi penggunaannya, Tagihan TP/TGR, Aset Tak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya sebelum sebesar Rp 0,00 sama dengan tahun sebelumnya secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.1 Aset Lain-lain

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lain-lain	Rp 8.250.000,00	Rp 8.250.000,00

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnya masuk kedalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi seperti kondisi barang rusak berat. Saldo per 31 desember 2023 sebesar Rp 8.250.000,00 Tidak mengalami kenaikan dan penurunan.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00

Berikut Rincian Aset Lain-lain:

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Saldo per 31/12/2022
Aset Rusak Berat/Usang Kendaraan Dinas Roda Dua	8.250.000,00	8.250.000,00
Jumlah	8.250.000,00	8.250.000,00

5.2.2.1.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp8.250.000,00) dan 31 Desember 2022 sebesar (Rp8.250.000,00).

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)	0,00	(0,00)
Jumlah	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)	0,00	(0,00)

5.2.3 Kewajiban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban	92.223.171,00	100.940.921,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp 92.223.171,00 mengalami penurunan sebesar (Rp8.717.750,00) dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	92.223.171,00	100.940.921,00	(8,64)	(8.717.750,00)
Jumlah	92.223.171,00	100.940.921,00	(8,64)	(8.717.750,00)



5.2.3.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek	92.223.171,00	100.940.921,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp 92.223.171,00 mengalami penurunan sebesar (Rp8.717.750,00) dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang Beban	92.223.171,00	100.940.921,00	(8,64)	(8.717.750,00)
Jumlah	92.223.171,00	100.940.921,00	(8,64)	(8.717.750,00)

5.2.3.2 Utang Beban

Utang Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	92.223.171,00	100.940.921,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp100.940.921,00 mengalami penurunan sebesar (Rp8.717.750,00) dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang beban	92.223.171,00	100.940.921,00	(8,64)	(8.717.750,00)
Jumlah	92.223.171,00	100.940.921,00	(8,64)	(8.717.750,00)

Rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ub.Desember 2023	86.466.495,00	95.083.603,00
Jumlah	86.466.495,00	95.083.603,00

Rincian Utang Beban Barang Jasa sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Hutang Tagihan Rekening Air PDAM Ub. Desember 2023	29.100,00	78.500,00
Hutang Tagihan Listrik Ub. Desember 2023	5.727.576,00	5.045.938,00
Hutang Tagihan Internet/Telepon Ub. Desember 2023	0,00	732.880,00
Hutang Pajak	0,00	0,00
DII	0,00	0,00
Jumlah	5.756.676,00	5.857.318,00

5.2.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas	10.656.767.435,97	11.054.911.769,97

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.656.767.435,97 mengalami Penurunan sebesar (Rp398.144.334,00) dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Ekuitas	10.656.767.435,97	11.054.911.769,97	(3,60)	(398.144.334,00)
Jumlah	10.656.767.435,97	11.054.911.769,97	(3,60)	(398.144.334,00)



5.2.3.4 Kewajiban dan Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban dan Ekuitas	10.748.990.606,97	11.155.852.690,97

Saldo kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.748.990.606,97 mengalami penurunan sebesar (Rp. 305.921.163,00) dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	10.748.990.606,97	11.054.911.769,97	(2,77)	(305.921.163,00)
Jumlah	10.748.990.606,97	11.054.911.769,97	(2,77)	(305.921.163,00)

5.3 Kegiatan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan *Surplus/Defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Lamandau dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli



Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Uraian	2023	2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39.240.000,00	27.800.000,00	11.440.000,00	41,15
Pendapatan Retribusi Daerah	39.240.000,00	27.800.000,00	11.440.000,00	41,15
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2023. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 39.240.000,00 tahun 2022 sebesar Rp 27.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	39.240.000,00	27.800.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah		
Jumlah	39.240.000,00	27.800.000,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Daerah di TA 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah karena pada tahun 2023 peminat pemain badminton meningkat sehingga pendapatan retribusi mengalami kenaikan;
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 39.240.000,00.



Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Mengelola Pendapatan Pajak Daerah

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 39.240.000,00 dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 27.800.000,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Mengelola Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Mengelola Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.3.2 Beban-LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Lamandau, dengan realisasi dalam tahun 2023 sebesar Rp 11.164.678.981,00 tahun 2022 sebesar Rp 7.845.995.663,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	2023	2022
Beban Pegawai	2.843.768.139,00	2.774.430.205,00
Beban Persediaan	889.422.076,00	1.122.112.890,00
Beban Jasa	1.492.548.617,00	1.643.324.234,00
Beban Pemeliharaan	108.237.650,00	139.839.200,00
Beban Perjalanan Dinas	738.720.510,00	566.240.200,00
Beban Hibah	4.624.084.000,00	1.138.742.000,00
Beban PenyusutanPeralatan dan Mesin	111.435.603,00	113.366.972,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	344.451.990,00	336.101.441,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.596.438,00	11.838.521,00
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	1.413.958,00	00



5.3.2.1 Beban Operasi

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023. Beban Operasi pada tahun 2023 sebesar Rp11.164.678.981,00dan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.845.995.663,00dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023	2022
Beban Pegawai	2.843.768.139,00	2.774.430.205,00
Beban Persediaan	889.422.076,00	1.122.112.890,00
Beban jasa	1.492.548.617,00	1.643.324.234,00
Beban Pemeliharaan	108.237.650,00	139.839.200,00
Beban Perjalanan Dinas	738.720.510,00	566.240.200,00
Beban Hibah	4.624.084.000,00	1.138.742.000,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	111.435.603,00	113.366.972,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	344.451.990,00	336.101.441,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.596.438,00	11.838.521,00
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	1.413.958,00	00
Jumlah	11.164.678.981,00	7.845.995.663,00

Realisasi masing-masing jenis Beban Operasi tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 2.843.768.139,00dan mengalami Kenaikan sebesar Rp 69.337.934,00 atau 2,50% bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp 2.774.430.205,00 Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023.

Rincian Beban Pegawai tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.324.518.928,00	1.117.139.320,00	207.379.608,00	18,56
Beban Tunjangan Keluarga PNS	0,00	117.333.135,00	(117.333.135,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	146.904.950,00	142.585.000,00	4.319.950,00	3,03
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.670.000,00	25.975.000,00	2.695.000,00	10,38
Beban Tunjangan Beras PNS	80.313.780,00	74.013.240,00	6.300.540,00	8,51
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	71.773.550,00	75.396.417,00	(3.622.867,00)	(4,81)
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.303,00	13.010,00	3.293,00	25,31
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.180.488.628,00	1.215.405.083,00	(34.916.455,00)	(2,87)



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.962.000,00	1.170.000,00	792.000,00	67,69
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.120.000,00	5.400.000,00	3.720.000,00	68,89
Jumlah	2.843.768.139,00	2.774.430.205,00	69.337.934,00	2,50

Penjelasan :

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Pada tahun 2023 terdapat 2 (Dua) orang pegawai pengapusan dari CPNS diangkat menjadi PNS;
 - Terdapat 6 (Enam) orang pegawai yang naik pangkat;
 - Terdapat 6 (Enam) Orang Pegawai naik gaji berkala, sehingga belanja gaji pegawai mengalami kenaikan dan berpengaruh terhadap realisasi.
- Pengakuan Belanja Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar (Rp8.617.108,00) (Rp2.843.768.139,00 – Rp 2.852.385.247,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Belanja Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(8.617.108,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Beban TPP Tahun 2023	86.466.495,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Beban TPP Tahun 2022	95.083.603,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(8.617.108,00)

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan beban barang dan jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 3.228.928.853,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp 242.587.671,00), atau (6,99)% bila dibandingkan dengan beban barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp 3.471.516.524,00. Beban barang dan jasa disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban barang dan jasa terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai barang dan jasa sebesar barang dan jasa yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2023.

Rincian Beban Barang dan Jasa tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Saldo2023	Saldo2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang/Persediaan	889.422.076,00	1.122.112.890,00	(232.690.814,00)	(20,74)
Beban Jasa	1.492.548.617,00	1.643.324.234,00	(150.775.617,00)	(9,18)
Beban Pemeliharaan	108.237.650,00	139.839.200,00	(31.601.550,00)	(22,60)
Beban Perjalanan Dinas	738.720.510,00	566.240.200,00	172.480.310,00	30,46
Jumlah	3.228.928.853,00	3.471.516.524,00	(242.587.671,00)	(6,99)

Penjelasan :

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan Adanya penurunan belanja barang dan jasa di tahun 2023.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari/dengan saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar (Rp736.067,00) (Rp3.228.928.853,00 – Rp3.229.664.920,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(736.067,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Beban Air Tahun 2023	29.100,00
✓ Beban Pajak Kendaraan 2023	2.369.575,00
✓ Beban Listrik Tahun 2023	5.727.576,00
✓ Beban Internet Tahun 2023	0,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Beban Pajak Kendaraan 2022	3.005.000,00
✓ Beban Air Tahun 2022	78.500,00
✓ Beban Listrik Tahun 2022	5.045.938,00
✓ Beban Internet Tahun 2022	732.880,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(736.067,00)

5.3.2.1.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 889.422.076,00 dan mengalami penurunan sebesar (232.690.814,00) atau 20,74% bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2022 sebesar Rp.1.122.112.890,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo2023	Saldo2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.889.000,00	3.065.000,00	1.824.000,00	59,51
Beban Bahan-Bahan Kimia	8.892.000,00	10.025.684,00	(1.133.684,00)	(11,31)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.749.200,00	33.894.750,00	854.450,00	2,52
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	560.000,00		560.000,00	
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.320.000,00		2.320.000,00	
Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.701.950,00	12.033.125,00	(2.331.175,00)	(19,37)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.062.400,00	46.200.000,00	(5.137.600,00)	(11,12)



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.412.876,00	46.347.000,00	19.065.876,00	41,14
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.270.500,00	26.364.500,00	(8.094.000,00)	(30,70)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	62.051.700,00	45.417.000,00	16.634.700,00	36,63
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.318.500,00	7.350.000,00	(5.031.500,00)	(68,46)
Beban Obat-Obatan-Obat	12.015.000,00	4.988.000,00	7.027.000,00	140,88
Beban Makanan dan Minuman Rapat	203.413.000,00	202.720.080,00	692.920,00	0,34
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.185.000,00	18.613.000,00	(428.000,00)	(2,30)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.100.000,00	38.217.000,00	11.883.000,00	31,09
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.471.000,00		4.471.000,00	0,00
Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100)
Beban Pakaian Olahraga	124.869.200,00	168.364.869,00	(43.495.669,00)	(25,83)
Beban Pakaian Paskibraka	170.964.000,00	168.282.882,00	2.681.118,00	1,59
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.476.750,00	1.980.000,00	8.496.750,00	429,13
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	37.600.000,00	277.250.000,00	(239.650.000,00)	(86,44)
Jumlah	889.422.076,00	1.122.112.890,00	(232.690.814,00)	(20,74)

Penjelasan :

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Adanya peningkatan perubahan penganggaran karena tahun 2022 masuk pada belanja barang dan jasa sedangkan di tahun 2023 penganggaran masuk di belanja hibah.
 - Adanya penurunan anggaran pada belanja barang dan jasa.
- Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 889.422.076,00.

5.3.2.1.4 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan lainnya, periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 1.492.548.617,00 mengalami Penurunan sebesar (Rp 150.775.617,00) atau 9,18% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2022 sebesar Rp 1.643.324.234,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	368.510.000,00	397.160.000,00	(28.650.000,00)	(7,21)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.250.000,00	24.990.000,00	1.260.000,00	5,04
Beban Jasa Tenaga Administrasi	296.690.421,00	324.029.390,00	(27.338.969,00)	(8,44)



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Beban Jasa Tenaga Kebersihan	159.814.298,00	222.255.437,00	(62.441.139,00)	(28,09)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	90.379.181,00	66.202.228,00	24.176.953,00	36,52
Beban Jasa Tenaga Supir	20.645.422,00	20.609.558,00	35.864,00	0,17
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tata Rias	18.750.000,00	20.250.000,00	(1.500.000,00)	(7,41)
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	9.250.000,00	5.650.000,00	3.600.000,00	63,72
Beban Tagihan Air	982.300,00	513.500,00	468.800,00	91,30
Beban Tagihan Listrik	73.873.773,00	86.413.724,00	(12.539.951,00)	(14,51)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.040.000,00	22.170.000,00	(6.130.000,00)	(27,65)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.061.600,00	9.507.620,00	(1.446.020,00)	(15,21)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.386.175,00	6.251.858,00	(1.865.683,00)	(29,84)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	45.311.196,00	47.669.011,00	(2.357.815,00)	(4,95)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	3.571.908,00	(3.571.908,00)	(100,00)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.179.251,00	0,00	3.179.251,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	11.200.000,00	(11.200.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Beban Sewa Mebel	445.000,00	3.300.000,00	(2.855.000,00)	(86,52)
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00	9,09
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	8.750.000,00	7.000.000,00	1.750.000,00	25,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	41,29
Beban Sewa Hotel	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	7.400.000,00	800.000,00	6.600.000,00	825,00
Beban Sosialisasi	296.930.000,00	319.780.000,00	(22.850.000,00)	(7,15)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	0,00
Jumlah	1.492.548.617,00	1.643.324.234,00	(150.775.617,00)	(9,18)

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya penurunan anggaran pada belanja jasa pada tahun 2023.
2. Pengakuan Beban Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari/dengan saldo Belanja Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar (Rp736.067,00) (Rp1.492.548.617,00 – Rp1.493.284.684,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(736.067,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Beban Air Tahun 2023	29.100,00
✓ Beban Pajak Kendaraan 2023	2.369.575,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Nilai
✓ Beban Listrik Tahun 2023	5.727.576,00
✓ Beban Internet Tahun 2023	0,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Beban Pajak Kendaraan 2022	3.005.000,00
✓ Beban Air Tahun 2022	78.500,00
✓ Beban Listrik Tahun 2022	5.045.938,00
✓ Beban Internet Tahun 2022	732.880,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(736.067,00)

5.3.2.1.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 108.237.650,00 dan penurunan sebesar (Rp 31.601.550,00) atau 22,60% bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp 139.839.200,00

Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Saldo2023	Saldo2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.990.000,00	61.963.200,00	(22.973.200,00)	(37,08)
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	4.130.000,00	1.970.000,00	47,70
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	3.120.000,00	(3.120.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	4.380.000,00	(4.380.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	2.760.000,00	(2.760.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.865.000,00	63.486.000,00	(50.621.000,00)	(79,74)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	42.202.650,00	0,00	42.202.650,00	0,00
Jumlah	108.237.650,00	139.839.200,00	(31.601.550,00)	22,60

Penjelasan :

- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - terpeliharanya peralatan dan mesin dengan baik
 - adanya pengadaan peralatan komputer pada tahun 2023
- Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 108.237.650,00.



5.3.2.1.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi sebesar Rp738.720.510,00dan mengalami Kenaikansebesar Rp 172.480.310,00atau 30,46% bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp566.240.200,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	653.263.210,00	501.446.200,00	151.817.010,00	30,28
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.657.300,00	64.794.000,00	9.863.300,00	15,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00
Jumlah	738.720.510,00	566.240.200,00	172.480.310,00	30,46

Penjelasan :

1. Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan karena semakin banyak kejuaraan yang diikuti oleh Atlet Kabupaten Lamandau
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* dari/dengan saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 738.720.510,00.

5.3.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang realisasi sebesar Rp 4.624.084.00,00dan mengalami kenaikan sebesar Rp 3.485.342.000,00atau 306,07% bila dibandingkan dengan beban hibah tahun 2022 sebesar Rp1.138.742.000,00 Beban Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau adalah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat dan Uang diberikan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2023	Saldo 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.225.000.000,00	1.093.742.000,00	3.131.258.000,00	286,29
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	59.527.000,00	0,00	59.527.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	339.557.000,00	45.000.000,00	294.557.000,00	654,57
Jumlah	4.624.084.000,00	1.138.742.000,00	3.485.342.000,00	306,07



Penjelasan :

- 1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan karena bertambahnya organisasi dan pihak ketiga yang menerima bantuan hibah dari pemerintah daerah
- 2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 4.624.084.000,00.

5.3.2.1.8 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, aset tetap tahun 2023 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2023 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp467.897.989,00dan mengalami Kenaikansebesar Rp6.591.055,00atau1,43% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp461.306.934,00Rincian Beban Penyusutan per SOPD tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Uraian	saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	111.435.603,00	113.366.972,00	-1.931.369,00	(0,46)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	344.451.990,00	336.101.441,00	8.350.549,00	2,48
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.596.438,00	11.838.521,00	(1.242.083,00)	10,49
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	1.413.958,00	00	1.413.958,00	0
Jumlah	467.897.989,00	461.306.934,00	6.591.055,00	1,43

Penjelasan :

- 1. Penjelasan nilai beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut :
 - a. Beban penyusutan akan bertambah setiap tahunnya apabila aset tersebut masih memiliki masa manfaat.
 - b. Pengurangan beban penyusutan akan terjadi apabila aset tersebut telah berakhir masa manfaatnya.

5.3.2.1.8 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	39.240.000,00	27.800.000,00	11.440.000,00	41,15
Beban	(11.164.678.981,00)	(7.845.995.663,00)	(3.318.683.318,00)	(42,30)
Surplus/Defisit LO	(11.125.438.981,00)	(7.818.195.663,00)	(3.307.243.318,00)	(42,30)



5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	11.054.911.769,97	11.379.213.002,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.125.438.981,00)	(7.818.195.663,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendaharan Dana Bos	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Aset Tanah	2.580.480,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	0,00	0,00
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Utang PFK	0,00	0,00
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen Kerugian Bajurung Raya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.724.714.167,00	7.493.894.430,00
EKUITAS AKHIR	10.656.767.435,97	11.054.911.769,97



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Penjelasan :

1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2022 senilai Rp 11.054.911.769,97;
2. Surplus/Defisit – LO senilai (Rp11.125.438.981,00) merupakan Defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2023;
3. Koreksi ekuitas Penyusutan Aset tetap sebesar Rp. 1.413.958,00
4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp 10.724.714.167,00
5. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp 10.656.767.435,97 sama dengan ekuitas akhir di Neraca per 31 Desember 2023



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta yuridiksi entitas berada Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau. Domisili Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau di Jalan Bukit Hibul Barat No.169 Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. Sifat operasi entitas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kegiatan pokoknya meliputi Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Modal.
- c. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca. Komitmen yang tidak ada dalam Neraca adalah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sebagai entitas akuntansi merupakan bagian dari Laporan Keuangan entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Laporan Realisasi APBD dan Neraca.

Kami berharap dengan Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2023 berbasis Akrua, Pengungkapan yang disajikan dalam Laporan ini, dapat berguna bagi Pemerintah Daerah. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas SOPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di masa yang akan datang.

Nanga Bulik, Juli 2024

Pengguna Anggaran,

LUHUT TAMPUBOLON, SE. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640827 199003 1 001

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU
PERHITUNGAN BEBAN/BELANJA DIBAYAR DIMUKA ATAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PLAT MERAH)
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Nilai Pajak yang Telah Dibayarkan	Masa Berlaku Pajak		Perhitungan Beban (Satuan Bulan)		Jumlah Beban dibayar dimuka Tahun 2023
				Awal	Akhir	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Sepeda Motor	KH 4847 RY	Rp 140.000	16 Maret 2023	16 Maret 2024	9 bulan	3 bulan	Rp 35.000
2	Sepeda Motor	KH 4553 RY	Rp 85.500	04 Mei 2023	04 Mei 2024	8 bulan	4 bulan	Rp 28.500
3	Sepeda Motor	KH 4558 RY	Rp 85.500	04 Mei 2023	04 Mei 2024	8 bulan	4 bulan	Rp 28.500
4	Sepeda Motor	KH 4557 RY	Rp 85.500	04 Mei 2023	04 Mei 2024	8 bulan	4 bulan	Rp 28.500
5	Sepeda Motor	KH 4554 RY	Rp 85.500	04 Mei 2023	04 Mei 2024	8 bulan	4 bulan	Rp 28.500
6	Sepeda Motor	KH 4556 RY	Rp 85.500	04 Mei 2023	04 Mei 2024	8 bulan	4 bulan	Rp 28.500
7	Sepeda Motor	KH 4555 RY	Rp 85.500	04 Mei 2023	04 Mei 2024	8 bulan	4 bulan	Rp 28.500
8	Sepeda Motor	KH 4441 RY	Rp 103.000	23 Juli 2023	23 Juli 2024	5 bulan	7 bulan	Rp 60.083
9	Sepeda Motor	KH 4445 RY	Rp 103.000	23 Juli 2023	23 Juli 2024	5 bulan	7 bulan	Rp 60.083
10	Sepeda Motor	KH 4439 RY	Rp 90.000	23 Juli 2023	23 Juli 2024	5 bulan	7 bulan	Rp 52.500
11	Sepeda Motor	KH 4438 RY	Rp 103.000	23 Juli 2023	23 Juli 2024	5 bulan	7 bulan	Rp 60.083
12	Sepeda Motor	KH 4444 RY	Rp 103.000	23 Juli 2023	23 Juli 2024	5 bulan	7 bulan	Rp 60.083
13	Sepeda Motor	KH 4203 RY	Rp 260.000	22 Oktober 2023	22 Oktober 2024	2 bulan	10 bulan	Rp 216.667
14	Mobil Jabatan	KH 1516 RU	Rp 1.718.400	10 Juni 2023	10 Juni 2024	7 bulan	5 bulan	Rp 716.000
15	Mobil Operasional	KH 8102 RW	Rp 1.888.200	25 Oktober 2023	25 Oktober 2024	2 bulan	10 bulan	Rp 1.573.500
Total								Rp 3.005.000

Nanga Bulik, Januari 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau,

LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
NIP. 19640827 199003 1 001



Perhitungan Beban Belanja TA. 2023 Yang Dibayar Di Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nilai Dibayar Rp	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Air PDAM	Rp 29.100,00	Ub. Desember 2023
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik	Rp 5.727.576,00	Ub. Desember 2023
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp 86.466.495,00	Ub. Desember 2023
Jumlah			Rp 92.223.171,00	

Nanga Bulik, Januari 2024

Pengguna Anggaran,

LUHUT TAMPUBOLON,SE. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001

DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO	DAFTAR PENERIMA	PAGU	REALISASI	KETERANGAN
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KABUPATEN LAMANDAU	Rp 3.535.000.000,00	Rp 3.535.000.000,00	HIBAH UANG
2	KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN LAMANDAU	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	HIBAH UANG
3	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN LAMANDAU	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	HIBAH UANG
4	KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	REHABILITASI TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA KERTAWANA
5	BADAN DAN LEMBAGA DI KABUPATEN LAMANDAU	Rp 99.225.000,00	Rp 99.225.000,00	HIBAH ALAT OLAHRAGA
6	PEMUDA KARANG TARUNA DESA PEDONGATAN KECAMATAN BULIK TIMUR	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	HIBAH BANTUAN PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA VOLLY
7	PEMUDA KARANG TARUNA DESA SUKAMAJU KECAMATAN BULIK TIMUR	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	HIBAH BANTUAN PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA VOLLY
8	PEMUDA KARANG TARUNA DESA SUNGKUP KECAMATAN BULIK TIMUR	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	HIBAH BANTUAN PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA VOLLY
9	DESA BUMI AGUNG KECAMATAN BULIK	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	HIBAH BANTUAN PENINGKATAN LAPANGAN OLAHRAGA SEPAK BOLA

Nanga Bulik, Januari 2024
Kepala Dispora Kabupaten Lamandau

LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19640827 199003 1 001